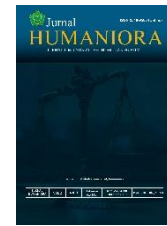


Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Aceh Besar

Zulfan¹, Irwan Safwadi*¹, Yuliana¹, Lukman T. Ibrahim¹, Dewi Astini²

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama, Km 8,5 Aceh Besar, Indonesia.

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama, Km 8,5 Aceh Besar, Indonesia.

*Email Korespondensi: irwan@abulyatama.ac.id

Diterima 22 Februari 2022; Disetujui 26 Maret 2022; Dipublikasi 30 April 2022

Abstract: *This study aims to determine the development strategy of disadvantaged areas in Aceh Besar District and the obstacles faced in developing disadvantaged areas in Aceh Besar District. This study uses a descriptive quantitative approach. The population in this study was all the underdeveloped villages in Aceh Besar District as many as 32 villages. The research sample consisted of 2 villages in Montasik District, namely Lampaseh Lhok Village and Weu Bada Village. Data collection with documentation techniques. The data used are in the form of data and archives regarding underdeveloped areas, Bappenas, Ministry of Villages, Bappeda, BPS and other related agencies. The data analysis model is descriptive quantitative and quantitative in the form of SWOT analysis. Based on the results, it is known that there are several development strategies for underdeveloped areas carried out by the Aceh Besar District Government, including the field of Human Resources (HR) development strategies carried out through the education sector by increasing education personnel and increasing the number of educational facilities. In the health sector, increasing medical personnel and health advice such as puskesmas at the sub-district level and posyandu and polindes at the underdeveloped village level with locations that can be reached by all disadvantaged rural communities. In the infrastructure sector, the strategy is to improve the quality of roads in terms of length, width and surface, clean water management, transportation and irrigation by using pumping and piping systems to meet the water needs of farmers. In the economic aspect, the Aceh Besar District government carries out a strategy by prioritizing aspects of people's economic empowerment based on mukim gampong by building the agricultural, fishery, and coastal management sectors into tourist destinations. The strategy for developing social and poverty aspects is carried out by opening up various employment opportunities, in the form of aquaculture, trade, agriculture and animal husbandry. Obstacles to the development strategy for disadvantaged areas of the Aceh Besar Regency government in the form of still strong sectoral egos, the allocation of development funds is not in accordance with the target, the allocation of unsustainable development and the lack of interest in the business world in investing funds or managing disadvantaged areas in Aceh Besar Regency.*

Keywords: *Analysis, Development Strategy, Disadvantaged Regions, Aceh Besar.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh desa tertinggal di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 32 desa. Sampel penelitiannya terdiri dari 2 desa dalam Kecamatan Montasik yaitu Desa Lampaseh Lhok

dan Desa Weu Bada. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan berupa data-data dan arsip mengenai daerah tertinggal, Bappenas, Kementerian Desa, Bappeda, BPS dan instansi lain yang terkait. Model analisis data bersifat deskriptif kuantitatif dan kuantitatif berupa analisa SWOT. Berdasarkan hasil diketahui bahwa terdapat beberapa strategi pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, di antaranya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan startegi yang dilakukan melalui bidang pendidikan dengan meningkatkan tenaga pendidikan dan meningkatkan jumlah sarana pendidikan. Bidang kesehatan, meningkatkan tenaga medis dan saran kesehatan seperti puskesmas ditingkat kecamatan dan posyandu serta polindes ditingkat desa tertinggal dengan lokasi bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat desa tertinggal. Dalam bidang infrastruktur, strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas jalan baik pajang, lebar dan permukaan, pengelolaan air bersih, transportasi serta irigasi baik dengan menggunakan sistem pompanisasi dan pemipaan untuk mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Dalam aspek ekonomi pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan strategi dengan memprioritaskan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis mukim gampong dengan membangun sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan pantai menjadi destinasi wisata. Strategi pembangunan aspek sosial dan kemiskinan dilakukan dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan, baik berupa budi daya tambak, perdagangan, pertanian dan peternakan. Kendala strategi pembangunan bagi daerah tertinggal pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupa masih kuatnya ego sektoral, pengalokasian dana pembangunan tidak sesuai dengan sasaran, pengalokasian pembangunan tidak berkelanjutan serta tiadanya ketertarikan dunia usaha dalam menginvestasikan dana atau mengelola daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Kata kunci : Analisis, Trategi Pembangunan, Daerah Tertinggal, Aceh Besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah kabupaten di Indonesia ada sekitar 400-450 kabupaten. Namun, tidak semua daerah kabupaten sudah tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada beberapa daerah yang masih tertinggal. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal.

Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten yang sebagian besar wilayahnya masih tertinggal. Kecamatan-kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Besar berkembang dengan sendirinya seiring tingginya mobilitas yang terjadi di masing-masing kecamatan terutama yang terletak di sekitar pusat pemerintahan. Sedangkan yang berada jauh dari jangkauan perkembangan wilayah akan semakin tertinggal. Sehingga tidak menampik kemungkinan adanya ketidakmerataan pembangunan

yang menimbulkan masih banyaknya wilayah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.

Realitanya permasalahan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar sering terjadi antar wilayah dan antar sektor. Ketimpangan antar wilayah sangat jelas apabila dilihat pada wilayah perdesaan dan perkotaan, sebagaimana terlihat pada pembangunan di daerah Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan dengan daerah lainnya yang masih tertinggal. Ketimpangan antar sektor di Kabupaten Aceh Besar juga sangat jelas apabila dilihat pada wilayah pertanian dengan wilayah nonpertanian. Wilayah perdesaan yang belum tereksplorasi dan terkelola potensi alamnya dengan baik akan menjadi wilayah tertinggal. Padahal, apabila potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap wilayah dalam Kabupaten Aceh Besar dapat tereksplorasi, terkelola, dan dikembangkan niscaya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi wilayah dan pemerintah

tersebut, terutama untuk pembangunan daerah dengan kekayaan potensi alam yang dimiliki.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sarana pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dinyatakan khusus pada Kabupaten Aceh Besar terdapat 125 gampong/desa yang masih tergolong tertinggal.

Penelitian terhadap wilayah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Besar merupakan wujud implementasi dari pemerataan pembangunan khususnya daerah tertinggal. Oleh karena itu, perlu strategi pembangunan daerah tertinggal sebagai langkah nyata yang terpadu dan terarah pada daerah dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil atau jauh dari jangkauan fasilitas ibu kota kabupaten. Sebaliknya diperlukan perhatian khusus pada daerah yang secara ekonomi memiliki potensi untuk maju, namun mengalami ketertinggalan sebagai akibat terbatasnya kemampuan memanfaatkan potensi, atau akibat terjadinya konflik sosial maupun politik.

Bertolak dari uraian di atas, maka upaya-upaya strategi pembangunan daerah-daerah tertinggal hendaknya dilakukan dengan memadukan prinsip-prinsip manajemen pembangunan modern dengan kearifan lokal tradisional yang dimiliki masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Besar sebagai daerah otonom adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksanaan kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berkembang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dengan tingkat kesenjangan yang minimal.

Dari ulasan dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, mengenai bagaimana strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Secara khusus, penulis mengambil judul penelitian “*Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar*”.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers dalam Rochajat (2011) adalah perubahan yang berguna

menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut Rostow sebagaimana dikutip oleh Abdul (2013) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat, 2011).

Kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia menurut Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2014) adalah adanya tahapan-tahapan (1) Strategi pertumbuhan, (2) Pertumbuhan dan distribusi, (3) Teknologi tepat guna, (4) Kebutuhan dasar, (5) Pembangunan berkelanjutan dan (6) Pemberdayaan.

Pembangunan Daerah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut Wanggai (2011) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kawasan tertinggal antara lain: rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan antar desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, isolasi wilayah, rendahnya kehadiran investor, dan rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi.

Konsep Strategi dalam Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah/region yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial region tersebut, serta tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah wilayah merupakan hal yang penting untuk didefinisikan secara tegas, baik dalam perencanaannya maupun proses implementasinya.

Menurut Friedman dalam Hanafiah (2014) menyatakan bahwa perencanaan wilayah adalah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan peraturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sosial tersebut. Ruang merupakan dasar yang penting bagi seorang perencana wilayah dalam membuat rencana sektoral nasional dan program-program pembangunan wilayah, serta merencanakan lokasi kegiatan tertentu disuatu wilayah ada di suatu lokasi tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Judul penelitian ini adalah analisis strategi

pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Variabel dalam penelitian yang akan dikaji ialah daerah tertinggal dilihat dari aspek perekonomian daerah, sumber daya manusia, prasarana atau infrastruktur, kapasitas daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah, potensi desa, perumahan dan lingkungan dan keadaan penduduk. Lingkup permasalahan yang akan dikaji ialah strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar dan kendala pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ialah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 23 kecamatan. Mengingat jumlah populasi begitu luas, maka diambil sampel 2 desa dalam Kecamatan Montasik yaitu Desa Lampaseh Lhok dan Desa Weu Bada. Penarikan sampel 2 desa ini dikarenakan di desa ini lebih banyak aspek kehidupan masyarakat yang tertinggal baik ekonomi, SDM maupun infrastruktur. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 2007:67).

Metode Analisis Data

Metode pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memformulasikan strategi dengan pendekatan konsep-konsep manajemen strategik. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan perhitungan prioritas strategi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Matriks ini merupakan hasil dari identifikasi terhadap faktor-faktor eksternal Kabupaten Aceh Besar berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang berpengaruh dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Penentuan bobot menggunakan metode *paired comparison*, sehingga diperoleh bobot dari masing-masing variabel. Penentuan bobot dengan menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh tujuh orang responden yang dianggap pakar dan memiliki kapasitas sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Penentuan peringkat (rating) juga dilakukan oleh tujuh responden sehingga diperoleh nilai terboboti dari faktor-faktor tersebut. Hasil dari identifikasi peluang dan ancaman sebagai faktor strategis eksternal, kemudian bobot dan rating dimasukkan kedalam matriks eksternal. Matriks ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Hasil akhir matriks EFE untuk elemen peluang diperoleh nilai akumulatif bobot sebesar 1,9877 dan untuk elemen ancaman diperoleh bobot skor sebesar 0,7160. Hal ini menunjukkan bahwa informan memberikan respon yang cukup tinggi terhadap faktor peluang dan respon yang lebih kecil terhadap faktor ancaman. Total nilai yang dibobot untuk faktor strategis eksternal yaitu sebesar 2,7037 artinya bahwa dalam pembangunan daerah tertinggal menunjukkan Kabupaten Aceh Besar sedang berusaha untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman.

Tabel 1. Matriks Evaluasi Pembangunan Indikator Desa Tertinggal Kabupaten Aceh Besar (Faktor Eksternal (EFE))

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Fisik Desa	0,1296	3	0,3889
Pendapatan	0,1049	2	0,2099
Perekonomian	0,1111	3	0,3333
Pendidikan	0,1235	3	0,3704
Kesehatan	0,1111	3	0,3333
Komunikasi dan Perhubungan	0,1173	3	0,3519
			1,9877
Ancaman	Bobot	Rating	Skor
Bencana alam daerah	0,1049	2	0,2099
Kondisi politik & keamanan yang tidak stabil	0,0864	2	0,1728
Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat	0,1111	3	0,3333
			0,7160
Total	1,0000		2,7037

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner dan wawancara pada tabel 1.1 terkait pembangunan fisik desa tertinggal di Kabupaten Aceh Besar ditunjukkan dengan bobot 0,1296 merupakan faktor paling penting untuk pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan fisik desa merupakan suatu jalan untuk menuju pembangunan daerah secara mandiri. Walaupun tidak semua daerah mampu untuk melakukannya, namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat maupun pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Selanjutnya peluang yang menempati urutan kedua dengan bobot 0,1235 adalah peningkatan pendapatan desa sehingga akan mempermudah pengembangan desa tertinggal tersebut dalam berbagai aspek. Urutan ketiga dengan bobot 0,1173 yaitu mulai stabilnya perekonomian di desa tertinggal yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Faktor ancaman yang paling berpengaruh terhadap pembangunan daerah tertinggal yaitu laju pertumbuhan penduduk yang meningkat yang ditunjukkan dengan bobot sebesar 0,1111, serta adanya bencana alam daerah dengan bobot 0,1049. Selanjutnya ancaman Kabupaten Aceh Besar yang

ketiga yaitu Kondisi politik & keamanan yang tidak stabil.

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Matriks ini merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor internal Kabupaten Aceh Besar berupa kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar. Pada Tabel 1.2 terlihat total matriks IFE sebesar 2.362 menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan kekuatan untuk pembangunan daerah tertinggal.

Kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar yaitu komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk bangkit dalam membangun daerahnya yang masih tertinggal dengan bobot 0,1337. Selanjutnya di urutan kedua di tempati oleh Sumber Daya Alam merupakan sektor unggulan dengan bobot 0,1283. Kekuatan yang menempati urutan ketiga yaitu penataan ruang Kabupaten Aceh Besar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada dengan bobot 0,1176.

Tabel 2 Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Kabupaten Aceh Besar dalam Pembangunan Daerah Tertinggal

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	0,1123	3	0,3369
Penataan ruang Kabupaten Aceh Besar	0,1176	3	0,3529
Adat Istiadat dan Budaya	0,1123	3	0,3369
Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	0,1337	4	0,5348
Sumberdaya Alam merupakan sektor unggulan	0,1283	3	0,3850
Kelemahan			
Kurangnya peran Institusi Pendidikan, Balai Penelitian dan Diklat dalam pembangunan	0,0535	1	0,0535
Lemahnya komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan	0,0428	1	0,0428
Kondisi geografis yang tidak rata dan labil	0,0535	1	0,0535
Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih rendah	0,0588	2	0,1176
Kurang aktifnya lembaga pembinaan/LPK	0,0535	1	0,0535
Ketersediaan dana yang terbatas/kecil untuk pembangunan daerah	0,0695	2	0,1390
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	0,0642	2	0,1283

Analisis Matriks SWOT

Berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, maka disusun beberapa alternatif strategi pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Aceh

Besar dengan cara memindahkan hasil dari analisis EFE dan IFE dalam matriks SWOT. Dari proses penggabungan pada matriks SWOT tersebut didapatkan beberapa alternatif strategi pembangunan yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Matriks ini dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 3 Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar

Internal	STRENGTH/ Kekuatan (S)	WEAKNESS/ Kelemahan (W)
Eksternal	Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (S1)	Kurangnya peran Institusi Pendidikan, Balai penelitian dan Diklat dalam pembangunan (W1)
	Penataan ruang Kabupaten Aceh Besar (S2)	Lemahnya komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan (W2)
	Adat Istiadat dan Budaya (S3)	Kondisi geografis yang tidak rata dan labil (W3)
	Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (S4)	Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih rendah (W4)
	Sumberdaya Alam merupakan sektor unggulan (S5)	Kurang aktifnya lembaga pembinaan/LPK (W5)
		Ketersediaan dana yang terbatas/kecil untuk pembangunan daerah (W6)
		Sarana dan Prasarana yang kurang memadai (W7)

<p>OPPORTUNITIES/Peluang (O)</p> <p>Otonomi daerah yang memberikan kebebasan (O1) Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta (O2) Mulai stabilnya perekonomian Nasional (O3) Kebijakan pemerintah pusat/propinsi (O4) Terbentuknya lembaga pembangunan daerah tertinggal (O5) Persaingan Antar Wilayah (O6)</p>	<p>STRATEGI S-O</p> <p>1. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah propinsi dengan kabupaten yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan (S1,S2,S4,S7,O4, O5,O6) 2. Menciptakan atau meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dengan berkerjasama dengan pihak-pihak swasta sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan tetap memperhatikan produk andalan daerah (S3,S4,S5,O1,O2,O3)</p>	<p>STRATEGI W-O</p> <p>1.Strategi pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dengan melibatkan lembaga pembangunan daerah tertinggal dengan pemerintah setempat (W2, W3, W5, W6, O1, O2, O5, O6) 2.Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan lebih melibatkan peran aktif dari institusi pendidikan, Balai penelitian juga partisipasi aktif masyarakat dan seluruh stakeholder bagi terbangunnya sistem kehidupan dan pemerintahan yang semakin demokratis, aspiratif, respontif, dan akuntabel (W1, W2, W4, W5,W7,O3, O4)</p>
<p>THREATS/ Ancaman (T)</p> <p>Bencana alam daerah (T1) Kondisi politik & keamanan yang tidak stabil (T2) Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat (T3)</p>	<p>STRATEGI S-T</p> <p>1. Membangun database dan menerapkan deteksi dini dalam penanganan akan terjadinya bencana alam (S2,S5,T1) 2. Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sebagai konsekuensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai antisipasi kelangkaan pangan akibat laju pertumbuhan penduduk yang meningkat (S1, S3, S4, T2, T3)</p>	<p>STRATEGI W –T</p> <p>1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara adil dan transparan (W2,W3,W6, W7,T1,T2) 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan kesehatan-pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan untuk kualitas IPM (indeks pembangunan manusia) dan filterisasi arus global (W1,W4, T3)</p>

Sumber : Data Primer, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 47,313, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 3.110. Hal ini memperlihatkan, berdasarkan perhitungan uji statistik F_{hitung} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya bahwa faktor sosial (X_1) faktor ekonomi (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima pegawai pada Pasar Induk Lambaro.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat beberapa strategi pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, di antaranya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui bidang pendidikan dengan meningkatkan tenaga pendidikan dan meningkatkan jumlah sarana pendidikan. Bidang kesehatan, meningkatkan tenaga medis dan sarana kesehatan seperti puskesmas ditingkat kecamatan dan posyandu serta polindes ditingkat desa tertinggal dengan lokasi bisa dijangkau oleh seluruh

masyarakat desa tertinggal.

2. Dalam bidang infrastruktur, strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas jalan baik panjang, lebar, dan permukaan, pengelolaan air bersih, transportasi serta irigasi baik dengan menggunakan sistem pompanisasi dan pemipaan untuk mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan strategi dengan memprioritaskan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis mukim gampong dengan membangun sektor pertanian, perikanan dan pengelolaan pantai menjadi destinasi wisata. Strategi pembangunan aspek sosial dan kemiskinan dilakukan dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan, baik berupa budi daya tambak, perdagangan, pertanian, dan peternakan.
3. Adapun kendala strategi pembangunan bagi daerah tertinggal pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupa masih kuatnya ego sektoral, pengalokasian dana pembangunan tidak sesuai dengan sasaran, pengalokasian pembangunan tidak berkelanjutan serta tiadanya ketertarikan dunia usaha dalam menginvestasikan dana atau mengelola daerah tertinggal yang ada di Kabupaten Aceh Besar

Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait.

Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, disarankan agar terus memperhatikan pembangunan daerah tertinggal baik dalam bidang infrastruktur, SDM, Ekonomi, dan lain sebagainya sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan

pembangunan.

Kepada masyarakat di desa tertinggal, agar terus berpartisipasi mendukung berbagai kegiatan pemerintah agar mampu meningkatkan pembangunan yang diharapkan.

Kepada aparat pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan, agar kedepan terus melakukan upaya peningkatan pembangunan daerah tertinggal dengan menghindari berbagai praktek kecurangan terhadap anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, 2013. Yogyakarta: UII.
- Abdul Wahab, 2013. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Almasdi Syahza dan Suarman “*Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013*. Pekanbaru Universitas Riau.
- Bappenas. 2015 *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Hanafiah, dkk. 2014. *Ekologi dan Mikrobiologi Tanah*. Jakarta: Rajawali Press:
- Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2012. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2014. *Manajemen*

*Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan
dan Panduan Untuk Perberdayaan
Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar*

Peraturan Perundang-Undangan:

Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2016

Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 126 Tahun 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan
Indikator Daerah Tertinggal Secara
Nasional.